

Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Muhamad Tisna Nugraha

*Dosen Jurusan PGMI
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
tisnanugraha2014@yahoo.com*

ABSTRAK

Education reformation that slowly run makes the potential of islam education of institution that existed has not discover not only from the professionalism side of educators but also the lack abdorption of graduated student from islam education of institution. There is no balancing numbers out put of graduated student with the job opportunities every year. So that, the rejuvenation of currucullum in Islam education of institution has to be priority especially dealing with other south east country approaching ASEAN Economic Community (MEA). Hope fully, curriculum development increases graduated competency that oriented to find a job become to create a job opprortunities. Curriculum is an education tool as the answer to needs and challenges not only as an instrument to achieve education purposes, but also as “The Heart of Education” in the process. There fore a good curriculum will become investation for better quality of education. Nevertheless a bad curriculum will produce worse quality of education.

Key Words: *Development, Islam Education Curricullum, MEA*

PENDAHULUAN

Pendidikan didefinisikan sebagai usaha “me-manusia-kan” manusia. Pengertian sederhana ini merujuk pada manusia mana yang hendak dimanusiakan dan oleh siapa yang memanusiakannya. Dengan kata lain, nilai (value) pendidikan akan sangat bergantung pada apa, siapa dan bagaimana memandang produk pendidikan yang sudah dimanusiakan menurut kategori dan tujuannya. Terlebih proses memanusiakan manusia ini tidak sebatas pada anak maupun remaja, tetapi juga secara luas terjadi pada orang dewasa.

Beberapa ahli pendidikan di Amerika Serikat misalnya, menyatakan bahwa mereka

di satu sisi mengharapkan adanya perubahan dibidang ekonomi dan sosial, namun di sisi lain lembaga pendidikan di negara tersebut justru masih berpegang teguh pada sebagian idealisme masa lalu yang kadang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Padahal kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup akan selalu bergantung dengan kondisi real yang bersifat ke-kini-an.

Asumsi di atas menunjukkan bahwa pendidikan adalah bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup manusia agar tetap eksis dan dapat bertahan (*survive*); dan kurikulum adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan yang mempunyai peran signifikan menentukan kema-

juan peradaban serta menjawab tantangan kehidupan. Maka berdasarkan hal tersebut tidak mengherankan pembahasan mengenai kurikulum hampir selalu ada dalam setiap pengkajian masalah-masalah pendidikan. Karena disadari benar bahwa kurikulum merupakan salah satu alat yang sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sehingga tidak berlebihan apabila kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat strategis dalam keseluruhan proses pendidikan, bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak serta bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan.

Seiring dengan semakin berkembangnya sarana transportasi, teknologi, dan tingginya keinginan bangsa-bangsa untuk saling mengenal sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:

“Hai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sunggu yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”¹

Maka berdasarkan firman Allah SWT., di atas Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, saat ini telah menjadi bagian dari pasar bebas negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurut Abdul Rachman Husein (2009: 139), keinginan Allah SWT dalam menciptakan makhluk-Nya selain untuk saling mengenal satu sama lain

adalah untuk dapat saling menolong juga. Inilah yang kemudian menjadi setting tujuan MEA, yang tidak hanya untuk membentuk perdagangan bebas (free market), melainkan juga memperkuat ekonomi negara dalam satu kawasan.

Namun, terlepas dari semangat saling menolong dan saling memperkokoh perekonomian dalam hubungan multilateral antar negara. Lembaga pendidikan pada akhirnya akan terkena imbas untuk menerapkan langkah-langkah antisipasi mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga salah satu upaya strategis dalam rangka memperoleh kesuksesan dan peluang menghadapi MEA adalah dengan mengembangkan kurikulum yang ada, terlebih pada kurikulum pendidikan agama Islam sebagai salah satu sektor pendidikan yang banyak memasok tenaga kerja handal dibidang ilmu agama dan keguruan, dan tentunya memiliki peran yang urgentif di dalam memcau pertumbuhan dibidang pendidikan Islam.

PROBLEMATIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI EROPA (MEA)

ASEAN Economic Community atau bisa dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), pada awalnya lahir dari organisasi ASEAN yang berdiri pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini memiliki fokus terhadap isu keamanan dan perdamaian di Asia tenggara selain isu di bidang ekonomi. Pada awal berdiri, ASEAN hanya terdiri dari lima negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Dalam perkembangan selanjutnya 5 negara lainnya ikut bergabung, yakni Brunei Darussalam (1984), Vietnam, (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999).

¹ *Qur'an Tajwid*. 2006. Jakarta: Maghfirah Pustaka. Hlm. 517.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan realisasi pasar bebas Asia Tenggara untuk meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat di kawasan ASEAN, hal ini adalah bagian dari visi organisasi ASEAN di tahun 2020 mengenai ekonomi ASEAN, yaitu:

We will create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, service and investments, a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities. (ASEAN Vision, 2020, 1997).

Dari visi tersebut, konsekuensi dari lahirnya MEA adalah aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja antara sesama negara anggota yang biasa dikenal dengan pasar bebas (free market). Sehingga dari aktivitas transaksi antar sesama anggota MEA, masing-masing negara anggota pada akhirnya harus mempersiapkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk siap menghadapi iklim persaingan pasar yang baru. Imbasnya, lembaga pendidikan mau tidak mau dihadapkan pada suatu realitas untuk siap menghadapi perubahan tersebut, terlebih pada lembaga pendidikan Islam sebagai sistem kontrol sosial dan organisasi yang mengedepankan nilai-nilai keislaman.

Ada tiga persoalan yang dihadapi oleh lulusan lembaga pendidikan Islam, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA). Pertama, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk siap pakai di dunia kerja. Dalam hal ini lembaga pendidikan Islam dipandang masih belum mampu secara merata memproduksi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan daya saing tinggi. Dampak dari kekurangan ini adalah, posisi-posisi

pekerjaan entry-level dan middle –level masih di dominasi oleh pekerja asing maupun tamatan lembaga pendidikan umum. Selain itu, lemahnya kemampuan ini, ternyata dibarengi dengan kekurangan terhadap penguasaan skill manajerial dan wawasan (*leadership skills* dan *global exposure*). Padahal kemampuan tersebut sangat dibutuhkan bagi perusahaan ataupun dunia kerja untuk dapat unggul dalam persaingan. Tanpa kemampuan manajerial yang baik, maka pengelolaan dan tujuan organisasi tidak dapat tercapai dengan baik pula.

Kedua, kecakapan bahasa lulusan lembaga pendidikan Islam yang belum terga-li secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya dominasi keberadaan lulusan lembaga pendidikan Islam yang berperan aktif dalam dunia kerja internasional khususnya di ASEAN, serta masih rendahnya lulusan lembaga pendidikan Islam yang mampu secara aktif mempraktikkan kemampuan berbahasanya. Padahal penguasaan jaringan (*networking*), penguasaan inovasi dan penguasaan teknologi perlu dibarengi dengan kecakapan di bidang bahasa sehingga memungkinkan terbukanya transfer knowledge dan relasi hubungan kerja yang menguntungkan.

Ketiga, perpindahan arus teknologi dan budaya secara global. Adanya aliran bebas perpindahan teknologi dan budaya menyebabkan kearifan lokal yang dimiliki oleh generasi muda khususnya para pemuda Islam dapat tergerus arus globalisasi yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Perubahan ini akan berdampak pada krisis identitas budaya bangsa yang pada akhirnya melahirkan budaya baru serta menghilangkan budaya lama.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, ketiga problematika lulusan lembaga

pendidikan Islam tersebut perlu dicarikan upaya strategis tentang bagaimana mengembangkan model pendidikan agama Islam yang berbasis pada isu-isu global di kawasan regional ASEAN. Sehingga lembaga pendidikan Islam akan mampu mempersiapkan lulusan-lulusannya, secara terampil, berkompetensi serta berdaya saing. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan Islam.

KURIKULUM PAI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

1. Pengembangan Kurikulum

a. Pengertian Pengembangan Kurikulum

Menurut Zuhri (2012: 25) kurikulum berasal dari bahasa Latin "*currere*" yang berarti tempat untuk berlari. Sedangkan definisi tradisional dari kurikulum adalah subject atau mata pelajaran untuk dipelajari. Istilah kurikulum ini pada awalnya populer dalam dunia olah raga "*curriculae*" (bahasa Latin), yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan dari awal sampai akhir. Dari istilah tersebut kurikulum masuk ke dunia pendidikan yang kemudian diartikan sebagai sejumlah mata kuliah dalam perguruan tinggi. Sehingga, kurikulum diartikan juga sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk memperoleh ijazah.

Sementara itu, menurut Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendi-

dikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum hendaknya tertuang dalam satu dokumen tertulis atau rencana tertulis yang berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang mengikuti kegiatan kurikulum tersebut.

Terkait dengan pengembangan kurikulum, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "pengembangan" secara etimologi diartikan sebagai pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Sedangkan secara terminologi, kata pengembangan diratikan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual.

Pengembangan kurikulum pada dasarnya memang dibutuhkan manakala kurikulum yang berlaku (*current curriculum*) dipandang sudah tidak efektif atau tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga dampak dari tiap perubahan tersebut, akan berpengaruh tergantung pada seberapa besar konsekuensi logis dari suatu perubahan yang dilakukan.

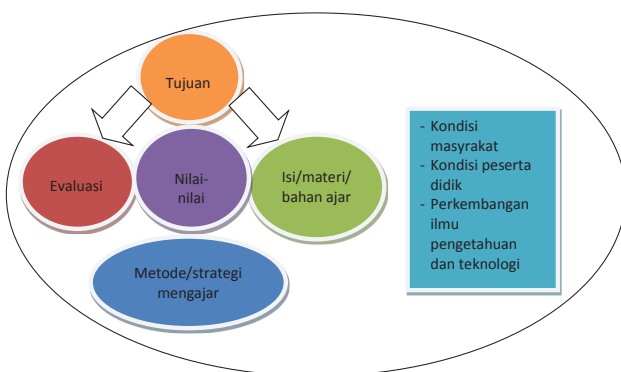
Dalam pelaksanaannya suatu perubahan kurikulum berskala nasional memang kerap kali terjadi seiring kebutuhan zaman. Hal ini mengundang sejumlah pertanyaan dan perdebatan, mengingat pergeseran ini berimplikasi pada dinamika pendidikan nasional. Apalagi kalau perubahan itu dilakukan secara tiba-tiba dan dalam waktu singkat tanpa ada pertimbangan yang jelas, tentu menimbulkan berbagai persoalan yang bersifat sporadis pada sektor-sektor formal dalam menyikapi perubahan.

Selanjutnya menurut Zuhri (2012: 65) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum berkaitan dengan penyusunan seluruh dimensi kurikulum mulai dari landasan, struktur penataan mata pelajaran, ruang lingkup

(scope), urutan materi pembelajaran, garis-garis besar program pembelajaran, sampai pengembangan pedoman pelaksanaan. Selain itu pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik didasarkan kepada hasil penilaian terhadap kurikulum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Artinya, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atau dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode dan waktu tertentu.

Pengembangan kurikulum PAI menurut setidaknya harus memperhatikan empat komponen, yaitu materi, tujuan, metode (strategi) dan evaluasi. Empat komponen tersebut menurut A. Rifqi Amin (2014: 46) di dalamnya harus bermuatan nilai-nilai ajaran Islam pada setiap komponennya. Keempat komponen tersebut harus terjalin secara integral sebagaimana yang terdapat dalam gambar berikut :

Gambar
Komponen Kurikulum yang Terintegral



b. Model Pengembangan Kurikulum

Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-

nya yang memungkinkan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengolahan pendidikan yang dianut. Ini mengingat model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan yang desentralisasi. Model pengembangan dalam kurikulum yang sifatnya subjek akademis berbeda dengan kurikulum humanistik, teknologis dan rekonstruksi sosial.

Adapun pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: (1) pendekatan *top-down the administrative model* dan (2) *the grass root model*.

1) Top-down the administrative model

Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama (klasik) dan yang paling banyak digunakan. Gagasan pengembangan kurikulum dengan model ini diawali dengan para administrator pendidikan (*policy maker*) yang menggunakan prosedur administrasi sebagai arah kebijakan. Dengan wewenang administrasinya inilah kemudian, membentuk suatu dewan atau tim pengarah (tim ahli) untuk merumuskan kerangka dasar dari landasan-landasan, kebijakan dan strategi utama pengembangan kurikulum.

Tahap selanjutnya administrator kemudian membentuk tim kerja yang bertugas menyusun kurikulum sesungguhnya. Kurikulum yang terbentuk dalam tahapan ini bersifat operasional dengan menjabarkan konsep-konsep dan kebijakan dasar yang telah digariskan oleh tim pengarah, seperti memilih sekuens materi, memilih strategi pembelajaran dan evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum bagi esekutor atau pelaksana di lapangan. Setelah tim kerja selesai melaksanakan

tugasnya, hasilnya dikaji ulang (evaluasi) oleh tim pengarah serta para ahli lain yang berwenang termasuk para pejabat yang berkompeten. Sehingga dalam pelaksanaannya, diperlukan kegiatan monitoring, pengawasan dan bimbingan. Apabila telah dianggap cukup baik, administrator puncak yang memberi tugas akan menetapkan berlaku atau tidaknya kurikulum tersebut. Karena datangnya dari atas, maka model ini disebut juga model top-down.

2) The grass root model

The grass root model merupakan kebalikan dari top-down the administrative model. Inisiatif pengembangan kurikulum pada The grass root model, bukan berasal dari atas (puncak) sebagaimana pola top-down the administrative model, melainkan dari bawah yakni bersumber dari guru-guru atau dosen-dosen (*first-line management*).

Dalam model pengembangan yang bersifat grass roots guru di suatu sekolah bisa saja mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu atau beberapa bidang studi ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum. Apabila kondisi sudah memungkinkan, baik dilihat dari kemampuan guru-guru, fasilitas biaya maupun bahan penunjang lainnya, maka pengembangan kurikulum model grass root akan lebih baik. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Gurulah yang lebih tahu kebutuhan kelasnya, oleh karena itu dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya.

Pengembangan kurikulum yang bersifat grass roots, mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah ter-

tentu, tetapi mungkin pula dapat digunakan untuk seluruh bidang studi pada sekolah atau daerah lain. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralistik dengan model ini, memungkinkan terjadinya kompetisi dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakatnya.

Terkait dengan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, tampaknya hal ini lebih cenderung merujuk pada pendekatan grass-root model. Kendati demikian, pengembangan kurikulum belum dapat berjalan efektif dikarenakan berbagai kendala terkait sumber daya manusia maupun sumber daya yang tersedia di sekolah. Untuk mereka yang berada di daerah perkotaan, mungkin hal ini nampak lebih mudah. Namun bagi mereka di daerah pedesaan apalagi pedalaman hal ini tentu cukup sulit. Belum lagi ditambah budaya dan adat kebiasaan yang berbeda di masing-masing daerah.

Pemilihan salah satu model pengembangan kurikulum akan berdampak pada perkembangan suatu peradaban. Untuk itu pembuat kebijakan kurikulum hendaknya mempertimbangkan segala kemungkinan sampai pada resiko yang akan dihadapi. Selain itu, berkaitan dengan perubahan, pembaruan, perbaikan dan pengembangan kurikulum, maka sangat dibutuhkan peran serta berbagai pihak dalam mewujudkan kurikulum yang yang tepat, serasi dan harmonis sehingga apa yang menjadi tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

2. Kurikulum PAI dalam Menghadapi MEA

Perubahan kurikulum dapat terjadi

scara bertahap (*evolusi*) maupun secara cepat (*revolusi*). Perubahan yang terjadi dalam suatu implementasi kurikulum menunjukkan prinsip relevansi keberadaan kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga, apapun bentuk dari suatu desain kurikulum pada akhirnya kurikulum tersebut akan tetap akan mengalami perubahan.

Secara konseptual dan faktual, kurikulum PAI yang ada saat ini masih mengekor kepada kurikulum pendidikan umum. Padahal, jika ditinjau dari sisi historis, lulusan lembaga pendidikan Islam di masa lalu seperti madrasah dan jami'ah telah banyak memberikan kontribusi terhadap peradaban Islam. Bahkan diantara mereka namanya tercatat dalam tinta emas ilmu pengetahuan modern. Sebut saja Ibnu Sina yang ahli dibidang filsafat dan kedokteran, Al-Idrisi ahli dibidang kartografi penemu bola dunia (*globe*), Abbas Ibnu Firnas ahli dibidang fisika dan penerbangan (*aeronautika*), al-Khawarizmi ahli matematika penemu angka "nol", al-Jazari ahli mekanik penemu robot dan lain-lain. Dari beberapa deretan nama ilmuwan dan penemu Islam tersebut, tidak mengherankan jikasejak abad ke tujuh sampai abad ke tiga belas, umat Islam berada di dalam abad kejayaan (*golden age*).

Kemajuan yang telah dicapai oleh intelektual muslim yang ada saat itu tentu bukanlah tanpa alasan. Salah satu faktor penentunya adalah kurikulum pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman selain sumbangsih dan perhatian pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada saat itu. Tidak mengherankan Marshall G Hodgson menyatakan bahwa umat Islam sangat terbuka dan mau belajar tentang teknologi dari mana saja tanpa rasa takut dan cemas. Mereka merasa sebagai pemenang (*antumlu a'launa*), bukan pecundang

yang menghardik dan apoligetik lantaran picik, dan tidak mampu seperti dalam pelajaran al Anzu wal al Karmu (*grape sour*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengembangan kurikulum PAI selayaknya diberikan dalam bentuk otonomi khusus bidang pendidikan. Diantaranya dengan pemberian hak mengurus arah kebijakan pendidikan Islam serta wewenang untuk menjalankannya. Dengan demikian, maka pengelolaan pendidikan Islam akan berubah dari sistem sentralisasi yang mengekor pada pendidikan umum ke sistem desentralisasi yang mengarah pada otonomi pendidikan seutuhnya.

Tidak hanya memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi lembaga pendidikan Islam. Pengembangan kurikulum PAI menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah langkah awal menempatkan lembaga pendidikan Islam langsung di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Sehingga pendelegasian hak-hak formal dalam hak domain lembaga pendidikan tidak lagi berada dalam suatu naungan yang mengekang dan membatasi kewenangan lembaga pendidikan Islam.

Selain itu dalam implementasi kurikulum PAI, materi ilmu kebahasaan tidak lagi menjadi bagian dari mata pelajaran atau materi perkuliahan dalam semester tertentu. Bahasa internasional seperti: Arab, Mandarin dan Inggris hendaknya menjadi bahasa pengantar dalam berkomunikasi pada seluruh materi yang disampaikan guru dan dosen di kelas. Selain itu penerapan kebijakan ini termasuk dengan menyediakan fasilitas berupa buku-buku materi pelajaran atau perkuliahan yang menggunakan tulisan dua bahasa (*bilingual*) termasuk menyediakan corner untuk memperlancar kemampuan peserta didik dalam menguasai keterampilan bahasa.

Terakhir, kurikulum yang ada hendaknya merupakan kurikulum yang berada dalam tataran praktis dan bukan lagi kurikulum yang bersifat teoritis. Hal ini berarti merubah peran lembaga pendidikan Islam yang selama ini hanya menghasilkan lulusan yang bersifat formalitas, menjadi industri produk dan jasa yang mampu memasok lulusan siap pakai dan terampil dibidang agama dan sains. Seperti mampu melakukan penyelenggaraan jenazah, berceramah dan berkhotbah, bermain alat musik religi, menyeter, membuat kuliner serba halal, bahkan membuat pesawat tanpa awak atau drone.

Dari berbagai paparan di atas, paradigma pengembangan kurikulum PAI, hendaknya tidak bersifat apa adanya, formalitas dan asal jadi saja. Apa lagi berpihak dan menguntungkan segelintir kelompok tanpa memikirkan dampaknya bagi hajat hidup orang banyak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rumadi (2009: 152), bahwa perubahan-perubahan kurikulum dari waktu ke waktu, sekedar menukar posisi materi, tidak sampai mengubah paradigma dan perspektif dalam melihat setiap problema yang ada dalam materi pembelajaran.

PENUTUP

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, kurikulum PAI di lembaga pendidikan Islam, saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan di dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, para pemangku kebijakan pendidikan (*policy maker*) dipandang perlu melakukan upaya perbaikan, penyesuaian (*relevansi*) terutama di dalam meningkatkan kualitas dan keahlian lulusan lembaga pendidikan Islam agar dapat langsung dipakai di pasar kerja.

Adapun pengembangan kurikulum PAI yang dapat dilakukan saat ini adalah den-

gan memperbaharui dan memodifikasi kurikulum yang sudah ada. Termasuk memberikan peluang membentuk kurikulum terpadu antara lembaga pendidikan Islam se-Asia tenggara serta pengembangan kompetensi lintas kurikulum se-Asia tenggara, dengan demikian, apa yang menjadi kebutuhan dan peluang dunia kerja, khususnya sektor pendidikan agama dapat diraih secara tepat sasaran.

Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting adalah pembekalan kemampuan penguasaan bahasa internasional yang dimulai dari bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, maupun di lingkungan akademisi. Penguasaan bahasa akan sangat memudahkan penyampaian informasi serta membantu penggunaannya di dalam bertransaksi dan berinteraksi antar lintas negara yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Husein. 2009. 7 Motivations of Islamic Business. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- A. Rifqi Amin. 2014. Sistem Pembelajaran pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum. Yogyakarta: Deepublish.
- Irfandi. 2015. Pengembangan Model Latihan Sepak Bola dan Bola Voli (Studi Penelitian Pada Atlet Putra-Putri di Banda Aceh). Yogyakarta: Deepublish.
- Muhamad Tisna Nugraha. 2010. Manajemen Kurikulum Pembelajaran. Pontianak: STAIN Press.
- Rumadi. 2009. Renungan Sntri: Dari Jihad hingga Kritik Wacana Agama. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Tasirun Sulaiman. 2009. *Wisdom of Gontor*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pustaka Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Yati Kurniati. Ed. Sjamsul Arifin dan R Winantyo. 2007. *Integrasi Keuangan dan Moneter di Asia Timur: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Qur'an Tajwid. 2006. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Zuhri. 2012. *Convergentive Design: Kurikulum Pendidikan Pesanren (Konsepsi dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Deepublish.